

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali. 2017. *Menguak Tabir Hukum: Edisi Kedua*. Kencana. Jakarta.
- Andi Fahmi Lubis, et.al. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. KPPU. Jakarta.
- Bambang Marhiyanto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Media Centre. Surabaya.
- Binoto Nadapdap. 2020. *Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi*. Kencana. Jakarta.
- Hermansyah. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- I Nyoman Putu Budiarta. 2016. *Hukum Outsourcing (Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum)*. Setara Press. Malang.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Joendi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2022. *Laporan Tahunan 2021: Pulih, Bangkit, dan Bersaing*. KPPU. Jakarta.
- L. Budi Kagramanto. 2008. *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*. Srikandi. Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Kencana. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, et.al. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- R. Soeroso. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Satipjto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT Cipta Aditya Bakti. Bandung.

- Sudiarto. 2021. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan. 2020. *Hukum Bisnis*. Kencana. Jakarta.
- W. Riawan Tjandra. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika. Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Zairin Harahap. 2014. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Rajawali Press. Jakarta.
- Zulkarnain. 2013. *Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*. Setara Press. Malang.

JURNAL

- Alya Anindita Maheswari. "Batasan, Wewenang dan Keterlibatan KPPU Dalam Kasus Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha". Jurist Diction. Vol. 3 No. 5. September 2020. 1581-1596.
- Ashabul Kahfi. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja". Jurisprudentie. Vol. 3 No.2. Desember 2016, 59-72,
- Baiq Ervinna Sapitri. "Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha (Studi Perbandingan Di Indonesia Dengan Negara- Negara *Common Law System*) *Authority of The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) In Case Management Competition (Studies Comparative in Indonesia by Common Law System Countries)*". Jurnal IUS. Vol. III No. 7. April 2015. 139-159.
- Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Johan Wahyudi & Razky Akbar. "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita pada Petitum Ex Aequo Et Bono". Yuridika, Vol. 29 No. 1. April 2014. 100-112.
- Irfani. "Grey Area Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan". Jurnal Konstitusi. Vol. 8 No. 6. Desember 2011. 993-1018.

Muh Risnain. "Eksistensi Lembaga *Quasi Judisial* Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha". Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 3 No. 1. Maret 2014. 49-58.

Rai Mantili, Hazar Kusmayanti and Anita Afriana. "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum". Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (*Journal of Law*). Vol. 3 No. 1. 2016. 116-132.

Sri Nur Hari Susanto. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi". Administrative Law and Governance Journal. Vol. 2 No. 1. Maret 2019. 126-142.

Titis Anindyajati. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 terhadap Praktek Persekongkolan Tender". Jurnal Konstitusi. Vol. 15 No. 2. Juni 2018. 369-392.

Wicipto Setiadi. "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan". Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 6 No. 4. Desember 2009. 603-614.

KARYA TULIS ILMIAH

Maria Avilla Cahya Arfanti. 2014. "Pelaksanaan Sistem e-procurement Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Untuk Mencegah Terjadinya Persekongkolan Tender (Studi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang)". Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656).

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 941).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1060).

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PUTUSAN

Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016.

Putusan Nomor 1K/KPPU/2007.

Putusan Nomor 458 K /Pdt.Sus-KPPU/2020.

Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-KPPU/2021.

Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN-Niaga SBY.

Putusan Perkara Nomor 18/KPPU-I/2018.

Putusan Perkara Nomor 20/KPPU-I/2018.

Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2020.

WAWANCARA

Devy Matondang, Wawancara Secara *Online* Melalui *Zoom Meeting*, Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Eksekusi KPPU, Makassar, 1 November 2022.

Djulita Masora, Wawancara Secara Tatap Muka di Pengadilan Negeri Makassar, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Makassar, 12 Juli 2022.

Moh. Ilham Makhal, Wawancara Secara *Online* Melalui *Zoom Meeting*, Staf Bagian Bantuan Hukum dan Eksekusi KPPU, Makassar, 1 November 2022.

Ningrum Natasya Sirait, Wawancara Secara *Online* Melalui Telepon *Whatsapp*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Makassar, 7 Oktober 2022.

Sukarmi, Wawancara Secara *Online* Melalui Pesan *Whatsapp*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Makassar, 4 Oktober 2022.

LAMPIRAN

Surat Keterangan Penelitian Pengadilan Negeri Makassar



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667
Website : <https://www.pn-makassar.go.id>, Email : info@pn-makassar.go.id,
Perdata : perdata@pn-makassar.go.id, Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
MAKASSAR90111

Makassar, 13 Juli 2022

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-UI/ 83 /PB.01/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Plh. Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

R. MOHAMMAD FADJARISMAN, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Yudha Sugiawan.**
Nomor Pokok : B011181527
No. Hp : 085330812422
Prog. Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Keperdataan
Alamat : Jl. Karunrung Raya II/3
Judul : **Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Yang
Dijatuhi Sanksi Administratif Pelarangan
Mengikuti Tender Dalam Putusan KPPU.**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan 12 Juli 2022.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tanggal 29 Juni 2022 Nomor : 5164/UN4.5.3/PT.00/2022.


PH. KETUA
R. MOHAMMAD FADJARISMAN, SH.,MH.
NIP. 19671228 199212 1 001

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Surat Keterangan Penelitian Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia



**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT KOMISI

SURAT KETERANGAN

Nomor 134/SJ.3/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deswin Nur
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Yudha Sugiawan
Asal Universitas : Universitas Hasanuddin
Fakultas : Fakultas Hukum

Telah melakukan wawancara daring dengan **Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Eksekusi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)** melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari Selasa, 01 November 2022 dengan judul penelitian "**Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Dijatuhi Sanksi Administratif Pelarangan Mengikuti Tender dalam Putusan KPPU**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 02 November 2022,
Kepala Biro
Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama,

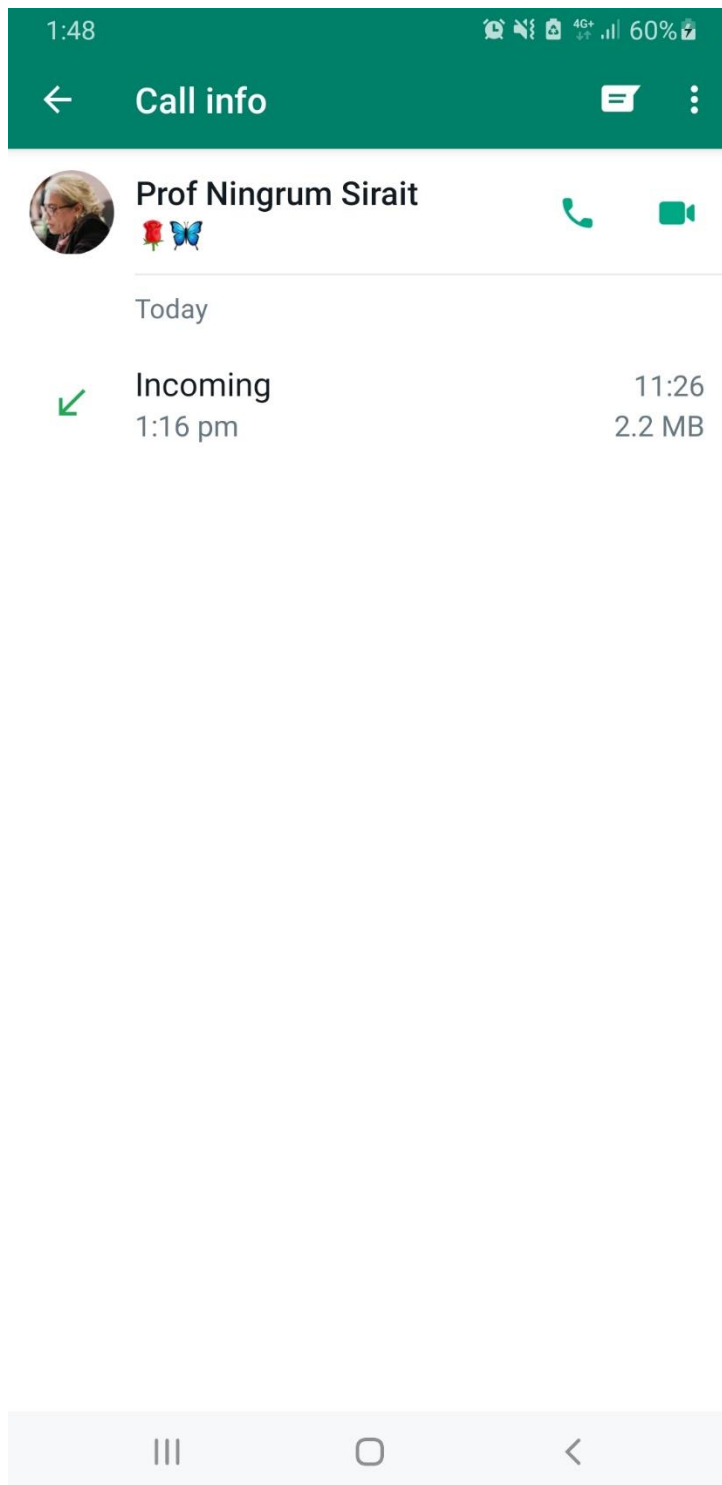
Deswin Nur

Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120
Telepon (021) 3507015, 3507016, 3507043, Faximile (021) 3507008

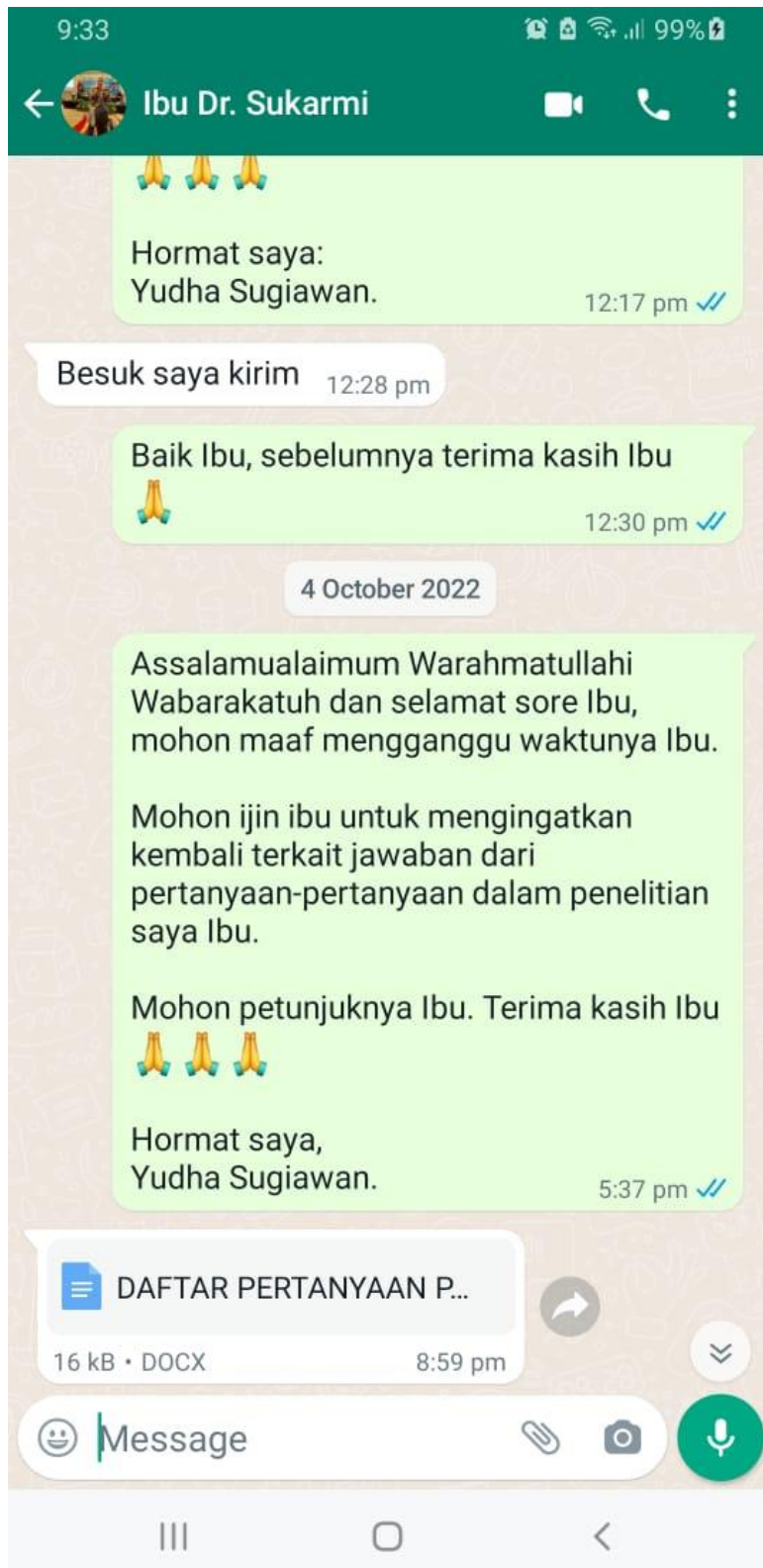
**Dokumentasi wawancara dengan Djulita Masora, S.H., M.H. Hakim
Pengadilan Negeri Makassar**



**Dokumentasi wawancara dengan Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait,
S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.**



**Dokumentasi wawancara dengan Dr. Sukarmi, S.H., M.H. Dosen
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**



Dokumentasi wawancara dengan Devy Matondang Kepala Bantuan Hukum dan Eksekusi KPPU dan Moh. Ilham Makhal Staf Bantuan Hukum dan Eksekusi KPPU.

